

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory atau teori keagenan adalah hubungan yang muncul dari agensi pada saat satu atau lebih orang sebagai *principal* dan membuat pekerjaan untuk orang lain, orang lain dalam hal ini disebut sebagai *agent* yang memberi sebuah jasa untuk kemudian melakukan delegasi dalam wewenang keputusan yang diambil terhadap agen yang bersangkutan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hal ini prinsipal melakukan delegasi wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen dalam pelaksanaan operasional perusahaan atau fungsi manajerial dan mengambil keputusan tentang bisnis untuk memberi *principal* kesejahteraan yang maksimal (Anthony dan Govindarajan, 2011). Pihak lain diberikan mandat oleh *principal*, pihak lain tersebut adalah *agent* dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan nama dan kapasitas *principal* sebagai bagian dalam pengambilan keputusan. *Principal* memberi pekerjaan kepada agen dalam pelaksanaan tugas yang juga dalam hal pengambilan keputusan ekonomik di lingkungan yang belum pasti seperti kondisi *financial distress* pada perusahaan. Seorang manajer yang juga agen akan melakukan pengambilan keputusan dalam melakukan strategi untuk melindungi kelangsungan usaha dari perusahaan

Teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi (Eisenhard 1989):

1. Yang pertama adalah sifat manusia termasuk dalam asumsi. Jenis asumsi ini merupakan sifat dari manusia bahwa mereka memiliki sifat yang berfungsi untuk membuat kepentingan diri sendiri atau disebut dengan *self interest*, *risk aversion* atau tidak menyukai risiko dan *bounded rationality* atau keterbatasan rasionalitas.
2. Keorganisasian juga masuk dalam asumsi. Asumsi jenis ini adalah keberadaan konflik berupa *Asymmetri Information* yang terjadi pada agen dan prinsipal, konflik antara anggota di organisasi, dan adanya efisiensi pada kriteria dalam produktivitas.
3. Informasi asumsi menjadi asumsi yang ketiga adalah asumsi mengenai informasi yang dilihat untuk barang komoditi untuk dilakukan jual beli.

Menurut tiga asumsi yang ada diatas, asumsi itu adalah sifat dasar dari manajer yang merupakan manusia. Akan muncul kemungkinan besar melakukan tindakan untuk mendapatkan kesempatan. Manajer tersebut akan melakukan hal itu sebagai kepentingan pribadi melalui kesempatan itu.

Mewujudkan teori agensi dapat menggunakan kontrak kerja untuk mengatur kewajiban dan hak setiap pihak dengan melakukan perhitungan terhadap manfaat dari semua hal. Apa itu kontrak kerja? Kontrak kerja adalah sebuah aturan yang mempunyai aturan terhadap beberapa mekanisme seperti hasil yang dibagi. Hasil tersebut berupa keuntungan, beberapa resiko *return* yang telah disetujui oleh dua pihak agen dan prinsipal.

Ada dua faktor yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak bisa dikatakan efisien, yang pertama adalah informasi simetris telah dimiliki oleh prinsipal dan

agen. Maksudnya adalah prinsipal dan juga agen mempunyai jumlah dan kualitas informasi yang sama. Faktor yang kedua adalah berkaitan dengan risiko. Agen mengambil risiko yang ada kaitannya dengan imbalan untuk jasa yang kecil. Ini berarti agen memiliki kepastian tinggi tentang menerima imbalan. *Agency theory* memiliki inti bahwa perlakuan desain dalam kontrak yang bagus memiliki fungsi untuk penyelarasan kepentingan agen dan juga prinsipal dilakukan untuk kepentingan yang berbeda (Scott, 2006).

Ada dua konflik keagenan yang potensial terjadi ditunjukkan oleh teori keagenan. (1) terdapat permasalahan agensi diantara pemegang saham dan manajemen (Jesen dan Meckling, 1976). (2) ada masalah agensi diantara minoritas dan mayoritas pemegang saham (Shleifer dan Vishny, 1997). Permasalahan atau konflik yang terjadi diantara manajemen dan pemegang saham harus dibereskan akan tidak menjadi panjang. Selain manajemen dan pemegang saham, konflik atau permasalahan juga terjadi pada bagian minoritas dan mayoritas yang ada di perusahaan. Konflik keagenan yang nomer satu akan terjadi jika kepemilikan saham telah tersebar yang akan membuat pemegang saham tidak bisa mengatur manajemen secara individu. Jadi manajemen harus bisa mengatur perusahaan atau menyiapkan rencana sebelum kepemilikan saham disebar. Hal tersebut akan memiliki akibat untuk perusahaan. Manajemen akan menjalankan perusahaan sesuai dengan yang dia inginkan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Permasalahan yang kedua untuk agen dapat terjadi ketika adanya konsentrasi kepemilikan atau pemegang saham mayoritas. Jadi, manajemen akan dikendalikan oleh mayoritas pemegang saham. Selain itu, pemegang saham juga

bisa menjadi bagian manajemen tersebut. Berarti dalam hal ini manajemen memiliki saham dan menjadi bagian dari pemegang saham. Kondisi tersebut bisa membuat sebuah perusahaan akan lebih leluasa untuk dikendalikan oleh manajemen sesuai dengan yang diinginkan termasuk adanya indikasi untuk melakukan praktik manajemen laba.

Penjelasan mengenai penyebab dari manajemen laba bisa menggunakan teori agensi. Manajer yang juga sebagai agen mempunyai tanggung jawab untuk secara moral membuat optimal pemilik keuntungan. Manajer memiliki salah satu tugas untuk membuat optimal keuntungan perusahaan sebagai bukti perusahaan memiliki kinerja yang baik. Jika kinerja perusahaan baik maka pemegang saham akan puas. Kepuasan tersebut bisa terjadi setelah investor melihat hasil dari laporan keuangan. Optimalisasi keuntungan tersebut dilakukan dengan cara diraihnya kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Berdasarkan kontrak akan terlihat keuntungan yang optimal dari perusahaan. Hal tersebut merupakan komoensasi untuk banyak pihak. Manajer adalah pengelola perusahaan yang bisa tahu prospek atau informasi perusahaan saat ini bahkan di masa yang akan datang jika dibandingkan dengan pemilik. Informasi yang diketahui oleh manajemen dan pemilik perusahaan tidak seimbang akan membuat terjadinya muncul sebuah kondisi asimetri informasi. Terjadinya asimetri informasi antara pemilik dan pihak manajemen akan memunculkan kesempatan bagi manajer untuk menjalankan apa yang disebut dengan *earning management*. *Earning management* sama artinya dengan manajemen laba. Adanya *earning management* dapat membuat pemilik kesulitan hingga salah dalam mengetahui informasi tentang kinerja ekonomi

perusahaan dikarenakan banyak data dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kinerja sesungguhnya dari perusahaan. *Earning management* dilakukan untuk mencapai keinginan tertentu dari manajer. Laporan keuangan yang sudah terkena manajemen laba akan sulit jika ada pihak lain yang ingin mengetahui kondisi ekonomi dari perusahaan yang sesungguhnya.

2.1.2 *Earning Management*

Ada dua cara untuk memahami manajemen laba cara (Scott, 2000). Yang pertama adalah dilihat dari manajer yang memiliki perilaku dalam pengambilan kesempatan dalam membuat maksimal utilitas pada saat berhadapan dengan harga politik atau *political cost*, kontrak kompensasi dan kontrak mengenai uang. Hal tersebut bisa jadi membuat manajer melakukan praktik manajemen laba karena beberapa alasan yang mendasar berkaitan dengan poin tersebut. Yang kedua adalah menggunakan perspektif kontrak yang efisien atau *efficient contracting* atau juga bisa disebut dengan *efficient earning management* yang digunakan untuk melihat manajemen laba. Manajer dapat mendapatkan manajemen laba yang fleksibel yang berfungsi untuk perlindungan perusahaan dan diri mereka sebagai antisipasi untuk beberapa kejadian yang mendadak sebagai keuntungan bagi beberapa pihak dalam kontrak. Manajemen laba digunakan oleh manajer sebagai pengaruh untuk nilai pasar saham. Contohnya seperti, pertumbuhan laba setiap saat dan *income smoothing* atau perataan laba.

Definisi manajemen laba dibagi menjadi dua (Sugiri 1998), yaitu:

1. Yang pertama adalah manajemen laba dengan definisi sempit merupakan manajemen laba yang ada kaitannya dengan metode akuntansi yang

dipilih. Definisi sempit manajemen laba adalah perilaku manajer dalam bermain menggunakan komponen akuntansi secara bebas. Hal tersebut dilaksanakan untuk membuat penentuan terhadap besaran laba.

2. Definisi luas Manajemen laba adalah kondisi dimana laba dikurangi atau ditingkatkan oleh manajer pada suatu usaha yang memang merupakan tanggung jawab manajer. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya penurunan atau peningkatan profitabilitas jangka panjang dalam bidang ekonomi.

Laporan keuangan yang direkayasa dalam manajemen laba memiliki beberapa batas yang tidak akan melakukan pelanggaran standar dalam membuat laporan keuangan. Wewenang dalam memilih metode akuntansi standar adalah wewenang dari manajemen yang dimanfaatkan dalam hal ini. Jadi sebenarnya ada beberapa kebijakan dan metode dalam bentuk alternatif mengenai akuntansi. Manajemen bisa bebas dalam memilih metode maupun kebijakan. Adanya preferensi dari manajer yang menjadi dasar dalam pemilihan kebijakan dan metode. Hal tersebut jelas diilahi dengan tujuan untuk menguntungkan pelaporan untuk periode tertentu. Manajemen melakukan percepatan adopsi terhadap penerapan standar yang menjadikan standar pelaporan keuangan menjadi dimanfaatkan. Kondisi perusahaan juga bisa dilaporkan menggunakan standar tersebut. Tindakan tersebut menjadi sah untuk dilakukan karena adanya keluwesan dalam standar akuntansi.

Manajemen melakukan manajemen laba dengan beberapa alasan. Terdapat dua macam faktor sebagai dasar praktik manajemen laba dilakukan oleh manajer (Scott 1997) yaitu sebagai berikut:

1. Merencanakan bonus

Perencanaan bonus adalah faktor pertama yang memberikan dorongan untuk manajer dalam melakukan praktik manajemen laba dimana informasi laba bersih perusahaan yang dimiliki manajer membuat munculnya kesempatan untuk manajer melakukan tindakan membuat laba maksimal dengan *earning management* yang ada saat ini di perusahaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *earning management* merupakan kondisi manajer diberi manajemen laba kemudahan untuk melakukan perlindungan diri bagi perusahaan dan juga mereka sendiri sebagai langkah antisipasi beberapa kejadian tanpa direncanakan sebelumnya termasuk beberapa pihak dalam kontrak yang juga mendapat keuntungan.

2. Adanya motivasi lain

Manajer juga didorong faktor lain untuk melakukan praktik manajemen laba. Faktor lain tersebut dapat berupa informasi mengenai investor, politik, IPO (Initial Public Offering), pergantian CEO perusahaan, dan juga pajak. Jadi dalam motivasi lain yang merupakan faktor kedua ini, lebih luas dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Faktor tersebut membuat munculnya keinginan manajemen untuk membuat praktik manajemen laba.

Berdasarkan pendapat Setiawan dan Na'im (2000), ada tiga jenis teknik dari manajer dalam melakukan manajemen laba. Tiga teknik tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Estimasi akuntansi dibuat dengan cara melakukan pemanfaatan pada peluang. Laba dapat dipengaruhi oleh manajemen dengan cara menggunakan perkiraan pada estimasi yang ada di akuntansi. Estimasi tersebut dapat berupa beberapa hal seperti amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi piutang tak tertagih yang memiliki tingkatan tertentu termasuk estimasi atau pengukuran biaya untuk garansi, dan masih banyak lagi.
2. Metode akuntansi yang dirubah. Penggunaan metode akuntansi yang telah berubah digunakan untuk menulis kembali detail transaksi. Transaksi tersebut dapat berupa metode depresiasi garis lurus yang semula merupakan depresiasi angka tahu. Jadi dalam hal ini ada perubahan dari metode depresiasi angka tahun. Standar akuntansi yang fleksibel atau luwes membuat metode akuntansi dapat dirubah.
3. Pendapatan dan periode biaya digeser. Teknik yang terakhir ini bisa berupa rekayasa untuk pengiriman produk dan barang ke pelanggan menjadi ditunda. Selain itu contoh lain adalah aktiva tetap yang berpengaruh dan akan dijual atau sudah tak terpakai lagi.

2.1.3 *Corporate Governance*

Pengertian dari *corporate governance* merupakan beberapa aturan yang memberikan aturan terhadap hubungan diantara beberapa pihak seperti karyawan, pemerintah, pihak kreditur, pengelola perusahaan, hubungan yang ada diantara pemegang, baik pemegang kepentingan eksternal maupun internal yang ada

kaitannya dengan pengendalian perusahaan dan sistem aturannya (Randy dan Juniarti 2013). Jadi dalam suatu perusahaan ada yang namanya *corporate governance* sebagai perangkat aturan yang mengatur banyak hal mengenai hubungan beberapa pihak yang memiliki wewenang serta mengenai hak dan kewajiban pihak tersebut.

Berdasarkan FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) GCG memiliki tujuan untuk membuat penambahan nilai bagi *stakeholder*. Selain itu, FCGI juga memiliki pendapat mengenai penerapan GCG jika perusahaan akan mendapatkan beberapa keuntungan. Adapun keuntungan yang bisa didapatkan adalah perusahaan akan lebih mudah dalam mendapat tambahan modal yang akan membuat *cost of capital* atau nilai modal menjadi lebih rendah. Selain itu, bisnis dalam hal kinerja dapat ditingkatkan dengan upaya tersebut yang akan membuat dampak positif pada saham yang ada dalam perusahaan. Selama ada hal yang terlihat positif terutama untuk kemajuan jangka panjang perusahaan, pasti akan dilakukan dan disetujui oleh banyak pihak yang ada dalam perusahaan termasuk penerapan dari GCG.

Menurut KNKG atau Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang terdapat pada GCG pedoman umum di Indonesia, ada lima prinsip atau asas yang membuat GCG menjadi pedoman untuk diterapkan, yaitu:

1. Pedoman yang pertama adalah Transparansi (*transparency*) merupakan cara yang terbuka pada saat melakukan pelaksanaan proses atas keputusan yang diambil kemudian menjadi terbuka pada saat memberikan informasi secara materiil yang relevan sesuai dengan perusahaan. Maksud dari

keterbukaan disini adalah transparansi dalam informasi relevan dan materiil mengenai perusahaan serta mengenai proses pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan. Transparansi sangatlah penting dalam sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat dipercaya oleh investor atau masyarakat luar. Jadi itulah mengapa keterbukaan atau transparansi ini sangat penting.

2. Kemandirian (*independency*). Tendensi adalah sebuah kondisi dimana pengelolaan profesional sebuah perusahaan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dan juga kepentingan dari berbagai pihak. Pengaruh tersebut biasanya tidak sama dengan aturan dari perundang-undangan yang pada saat ini sedang berlaku. Tidakan tersebut kadang juga bertentangan dengan prinsip-prinsip korporasi yang sesuai. Jadi sebuah pengelola perusahaan harus memiliki sikap maniri untuk terhindar dari kepentingan beberapa pihak. Kepentingan tersebut berupa kepentingan yang tidak baik karena bertentangan dengan perundang-undangan, jadi harus dihindari.
3. Akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas adalah berupa pertanggungjawaban organ, pelaksanaan dan fungsi yang jelas yang membuat efektif pengelolaan perusahaan menjadi terlaksana. Prinsip ini juga dapat dijelaskan sebagai rincian sistem dan struktur perusahaan yang baik. Segala yang ada dalam perusahaan harus memiliki prinsip akuntabilitas seperti penjabaran yang jelas mengenai semua hal dalam perusahaan.

4. Pertanggungjawaban (*responsibility*) Pertanggungjawaban adalah penyesuaian dalam mengelola perusahaan yang harus sesuai dengan perundang-undangan. Aturan tersebut juga berkaitan dengan prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban merupakan kepatuhan atau penyesuaian untuk perusahaan yang dikelola pada perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat yang masih berlaku. Pengelolaan perusahaan dalam bentuk apapun harus sesuai dengan aturan negara atau prinsip yang ada. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari semua elemen perusahaan selama masih ditata dalam prinsip korporasi dan perundang-undangan.
5. Yang terakhir adalah kewajaran atau *fairness*. Sebuah kewajaran adalah kesetaraan dan juga keadilan dalam memberikan hak untuk *stakeholder* atau pihak yang ada dengan dasar perjanjian serta perundang-undangan yang pada saat ini masih berlaku. Kewajaran sangat diperlukan untuk memenuhi hak beberapa *stakeholder* yang ada. Pemenuhan hak tersebut harus adil atau *fair* sesuai dengan prinsip yang ada. Jika tidak wajar atau setara maka akan timbul banyak permasalahan.

Komisaris independen digunakan sebagai pengukuran indikator dari mekanisme GCG (Wardoyo dan Veronica 2013:132). Pengertian dari komisaris independen dalam teori tersebut adalah kebanyakan komisaris yang dalam hal ini tidak turut serta memiliki kepentingan bisnis substansial di dalam perusahaan. Sikap independen dewan komisaris dapat diukur melalui presentase terhadap jumlah semua dewan komisaris yang ada. GCG memiliki pedoman bahwa harus

berjumlah sebanyak 30% untuk komisaris independen dari seluruh anggota yang ada di komisaris. Perusahaan harus memenuhi syarat tersebut untuk menjaga independensi sebagai syarat GCG supaya pengambilan keputusan menjadi cepat, tepat, dan lebih efektif. Jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan menggunakan Indikator mekanisme dari GCG, total dari anggota dewan direksi ditetapkan menggunakan jumlah satuan (Wardoyo dan Veronica, 2013). Proses monitoring dari manajemen akan semakin baik ketika jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal tersebut dapat membuat perusahaan diberi kepercayaan oleh para pemegang saham. Perusahaan memiliki anggota komite audit untuk mengukur komite audit untuk digunakan sebagai indikator mekanisme GCG (Wardoyo dan Veronica 2013). Sehingga perusahaan harus memiliki komite audit berdasarkan indikator resmi dari GCG. Mekanisme GCG terdiri dari dua mekanisme yaitu yang pertama adalah mekanisme eksternal dan yang kedua adalah mekanisme internal.

Mekanisme internal termasuk dalam penggunaan struktur dan proses internal dalam mengendalikan perusahaan. sehingga mekanisme internal memiliki pengaruh yang erat untuk perusahaan. Ada beberapa macam proses internal. Proses internal tersebut meliputi keberadaan komite audit, RUPS atau rapat umum pemegang saham, rapat *board of director*, rapat dewan komisaris dan dewan direksi. Proses internal tersebut termasuk dalam beberapa jenis kegiatan yang sering dilakukan disuatu perusahaan. Keberlangsungan proses internal dengan baik dalam suatu perusahaan akan membuat kinerja perusahaan menjadi baik.

Indikator yang kedua adalah mekanisme eksternal, kualitas audit digunakan untuk mekanisme tersebut. Salah satu dari mekanisme *corporate governance* adalah kualitas audit (Sameh M. Reda Reyad 2012). Perseroan Terbatas menjalankan tugas berupa pengawasan dan komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki anggota satu hingga lebih dan merupakan anggota dewan komisaris. Hal tersebut dijelaskan dalam UU RI No.40 tahun 2007. Berdasarkan aturan tersebut anggota dewan komisaris memiliki hak untuk membentuk komite audit dengan anggota seorang atau lebih. Maka kesimpulannya adalah bagian dari mekanisme internal *corporate governance* salah satunya adalah komite audit yang diawasi oleh dewan komisaris.

2.1.3.1 Efektivitas Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dua penjelasan tersebut merupakan pengertian dari dewan komisaris berdasarkan UU No.40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Tingkat manajemen laba dapat diturunkan dengan pengawasan pada manajemen yang ada di perusahaan untuk dilakukan oleh dewan komisaris. Jika ada suatu hal yang berhubungan dengan dewan direksi, dewan komisaris dapat melakukan pengawasan berdasarkan anggaran dasar yang ada. Menurut Junaedi dan Farina (2017), peran yang dijalankan oleh dewan komisaris merupakan efektif jika melihat pada independensi, aktivitas, kompetensi, dan jumlah anggota dewan komisaris. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kompetensi dewan komisaris, begitupula aktifitasnya

merupakan tolak ukur keefektivitasan dari dewan komisaris. Jika dewan komisaris dapat menemukan manajer yang melakukan praktik manajemen laba maka bisa dikatakan fungsi dewan komisaris tersebut telah efektif.

Pengawasan yang lebih sistematis dapat diperoleh dari pertemuan dewan komisaris yang dilakukan secara rutin. Selain itu, pertemuan tersebut juga dapat mengetahui adanya permasalahan sejak dini yang ada dalam perusahaan. Rapat yang sering diadakan oleh dewan *board* dapat membuat manajemen laba berkurang ditunjukkan penelitian yang dibuat oleh yang Xie *et al.* (2003) dan Zhou dan Chen (2004). Sehingga dalam hal tersebut akan mengurangi kejadian praktik manajemen laba. *Earning response coefficient* merupakan hal yang digunakan untuk mengukur jumlah rapat aktifitas dewan untuk kemudian diuji yang menghasilkan pengaruh positif yang cukup signifikan (Anderson *et al.* 2003). Maka, kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara frekuensi atau seberapa sering terjadinya rapat dewan dengan sikap independen dewan komisaris. Kedua hal tersebut akan berpengaruh pada kandungan informasi laba.

2.1.3.2 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan pedoman umum dari dari GCG atau *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006), total anggota dari dewan komisaris dibentuk dengan menyesuaikan kompleksitas perusahaan untuk tetap memberi perhatian seberapa efektif dalam mengambil. Jadi harus ada kesesuaian antara pengambilan keputusan dengan kondisi kompleksitas perusahaan.

Salah satu efektivitas dalam peran dewan diperoleh dari sebuah faktor yaitu jumlah anggota dewan. Akan lebih efektif jika dewan komisaris yang

dimiliki perusahaan memiliki jumlah yang banyak untuk melakukan pengawasan, jadi kinerja keuangan perusahaan dapat ditingkatkan ketika dibandingkan dengan jumlah sedikit anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Uadiale 2010).

2.1.4 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah sebuah bentuk komitmen untuk mendelegasikan pengendalian oleh para pemegang saham kepada manajer dalam tingkatan tertentu. Struktur modal tidak hanya ditunjukkan oleh presentase kepemilikan oleh manajer dan institusional tetapi juga jumlah utang. Beberapa variabel yang penting tersebut, merupakan hal penting dalam struktur modal yang ditunjukkan oleh struktur kepemilikan. Sehingga ada hubungan diantar struktur modal dan struktur kepemilikan.

Seseorang dan lembaga yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan atau lebih, besar atau kecil nilainya merupakan gambaran dari struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan ada hubungannya dengan monitoring perusahaan. Menurut pendapat dari Martikarini (2014), motivasi yang berbeda akan dimiliki oleh struktur kepemilikan pada saat melakukan monitoring pada perusahaan beserta manajemen dan dewan direksi. Jalannya perusahaan dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang kemudian dapat memengaruhi kinerja dari perusahaan. Menurut kutipan tersebut bisa diketahui bahwa bagus atau tidaknya kinerja perusahaan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Terdapat dua struktur kepemilikan salam yang ada di suatu perusahaan dan terdiri atas

kepemilikan saham untuk kemudian dimiliki oleh institusi dan manajerial (Scott, 2007).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional dan manajerial merupakan dua jenis mekanisme *corporate governance* untuk mengendalikan masalah mengenai keagenan. Kedua hal tersebut perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan tentang agen.

Total proporsi kepemilikan oleh manajer yang ada dalam perusahaan merupakan indikasi adanya kepentingan yang sama antara orang yang memegang saham dengan manajer (Prasetya, 2013). Pemegang saham dapat setiap saat memiliki kepentingan dengan manajemen merupakan indikasi dari proporsi jumlah kepemilikan manajerial.

Ada penelitian dari Classens *et al.* (2000) dalam Prasetya (2013) Struktur kepemilikan yang ada di negara Republik Ceko menjelaskan bahwa sebuah perusahaan memiliki nilai yang tinggi ketika lembaga keuangan dengan sponsor bank memiliki perusahaan tersebut. Investor mempercayai bank yang akan membuat tidak adanya eksproirasu atas aset yang ada pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan fungsi monitoring akan dijalankan dengan baik oleh bank. Maka dari itu pentingnya sebuah bank dalam menjadi sebuah pemilik perusahaan. Hal positif lain yang dapat diperoleh ketika sebuah bank memiliki perusahaan adalah mengenai suntikan dana. Akan ada saatnya sebuah perusahaan menghadapi masalah keuangan. Nah dalam hal ini merupakan peran bank untuk menyuntik dana sebagai pemilik perusahaan.

Hal tersebut berbeda dengan kepemilikan manajerial dengan pengaruh negatif pada manajemen laba hasil penelitian Yohana (2010). Sehingga dapat disebutkan bahwa praktik mengenai manajemen laba menjadi semakin rendah ketika kepemilikan manajerial tinggi.

2.1.4.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Praktik manajemen laba dapat dideteksi dengan struktur kepemilikan institusional. Sehingga penerapan tersebut akan mengurangi manajemen laba yang terjadi dalam suatu perusahaan. Mengapa demikian? Untuk investor individual memiliki pengalaman yang kurang jika dibandingkan dengan investor institusi.

Investor institusi bersifat mutahir untuk manajemen laba. Hal tersebut bisa terjadi karena investor dari sebuah institusi mampu dengan mudah melakukan proses mengenai informasi ketika dibandingkan dengan investor dalam bentuk individual. Praktik memainkan angka yang ada dalam laporan keuangan oleh manajemen dapat dibatasi oleh investor institusi. Kepemilikan institusional dan manajerial dapat memengaruhi munculnya *agency problem*.

Jenis dari kepemilikan institusional adalah kepemilikan berdasarkan saham yang diperoleh oleh lembaga atau perusahaan lain. Institusi tersebut bisa berupa investasi dari perusahaan, beberapa bank, perusahaan jasa asuransi beserta institusi yang lain dengan kepemilikan saham. *Agency conflict* dapat dikurangi dengan alat yang disebut dengan kepemilikan institusional yang memiliki

kemampuan sebagai pengendali pihak manajemen dalam proses melakukan monitoring dengan cara yang lebih efektif untuk mengurangi adanya manajemen laba. Menurut (Gideon, 2005), institusi yang memiliki persentase saham bisa melakukan proses pengaruh atas laporan keuangan yang disusun dengan tidak menutup kemungkinan adanya akrualisasi yang sama dengan kepentingan dari pihak manajemen. Laporan keuangan bisa dengan mudah dipengaruhi oleh institusi yang memiliki saham disebuah perusahaan.

Proses penyelarasan para pemegang saham dengan kepentingan manajemen dapat menggunakan pengaruh dari investor institusional. Pengaruh tersebut sangatlah penting untuk manajemen perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan dampak yang buruk ketika tingkat kepemilikan manajerial tinggi. Hal tersebut akan membuat timbulnya masalah dalam hal pertahanan. Artinya, jika mereka akan memiliki posisi yang kuat dalam mengontrol ketika kepemilikan manajerial tinggi. Kontrol dapat dilakukan pada pihak pemegang saham eksternal dan kepada perusahaan itu sendiri. Dampaknya, akan terjadi kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap tindakan manajer yang disebabkan oleh manajer yang memiliki hak voting cukup tinggi. Dalam mengambil keputusan mengenai kinerja manajer harus dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan yang maksimal.

2.1.4.2 Kepemilikan Manajerial

Persentase saham yang ada dalam manajemen perusahaan merupakan gambaran dari struktur kepemilikan manajerial. Para pemegang saham yang termasuk kedalam pihak manajemen perusahaan terdiri dari manajemen lain, dewan direksi dan komisaris yang telah ada dan tercantum dalam daftar pemegang

saham. Sebuah fakta mengenai kinerja dari perusahaan pada membaik atau baik jika proporsi kepemilikan saham manajerial juga meningkat. Dua hal tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Ada hal lain yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal lain tersebut berupa motivasi meningkatnya presentase kepemilikan manajerial yang akan menyamakan kedudukan pemegang saham dengan manajerial.

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi pada saat saham perusahaan dimiliki oleh manajer dan manajer tersebut adalah pemegang saham dari perusahaan (Christiawan dan Tarigan 2007). Sehingga manajer memiliki peran yang penting dalam dua hal yaitu kepemilikan manajerial dan pemegang saham. Presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer menunjukkan keadaan tersebut. Informasi tersebut akan masuk dalam catatan laporan keuangan karena termasuk bagian yang penting untuk pengguna laporan keuangan yang ada di perusahaan. *Agency theory* memiliki kaitan yang menarik dengan kepemilikan manajerial. Hubungan antara *agent* dan *principal* masuk kedalam kerangka *agency theory*. Nilai perusahaan akan ditingkatkan oleh manajer. Ada kemungkinan jika nilai atau kekayaan individu pemegang saham akan meningkat ketika nilai perusahaan juga meningkat.

Motivasi manajer perusahaan menentukan adanya tindak manajemen laba pada saat dilihat melalui sudut pandang teori mengenai akuntansi. Besaran manajemen laba akan berbeda jika motivasi juga berbeda. Contohnya seperti, motivasi manajer yang tidak memegang saham akan jadi berbeda jika dibandingkan dengan motivasi dari manajer yang sudah memegang saham. Dua

contoh tersebut dapat memengaruhi terjadinya manajemen laba dikarenakan apa yang dimiliki seorang manajer dapat menentukan keputusan atau kebijakan yang akan diambil mengenai metode dari akuntansi yang akan dipakai untuk sebuah perusahaan yang sedang dikelola. Jadi, tindakan manajemen laba dipengaruhi oleh presentase dalam jumlah tertentu mengenai kepemilikan saham.

2.1.5 Kualitas Audit

Kartika (2011) menyatakan bahwa audit merupakan sebuah proses sistematis untuk melakukan evaluasi dan memperoleh bukti dengan cara yang objektif yang memiliki hubungan dengan beberapa pernyataan mengenai banyak kejadian dan tindakan mengenai ekonomi yang berfungsi untuk melakukan penentuan terhadap tingkat hubungan diantara pernyataan itu dengan beberapakriteria yang telah ditetapkan untuk kemudian mengkomunikasikan hasil tersebut dengan beberapa pihak yang mempunyai kepentingan. Dalam hal ini audit merupakan proses yang penting untuk memberikan bukti mengenai kejadian atau tindakan ekonomi. Ada beberapa kriteria yang berhubungan dengan tindakan tersebut yang akan dikomunikasikan dengan beberapa pihak.

Menurut Boynton (2003), auditing merupakan sebuah proses yang sistematis guna memperoleh dan melakukan evaluasi bukti yang ada dengan cara objektif tentang beberapa peristiwa ekonomi dan asersi kegiatan. Tujuannya adalah untuk menetapkan derajat penyesuaian diantara beberapa asersi melalui kriteria yang telah ada. Dalam teori tersebut dibahas mengenai tujuan audit untuk menetapkan derajat kesesuaian dengan beberapa kriteria yang kemudian hasilnya akan disampaikan.

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kualitas audit yang bagus adalah pada saat melakukan audit dengan memenuhi standar pengendalian mutu serta melengkapi standar auditing yang telah dipastikan. Manajemen laba dapat dicegah dengan tindakan audit yang berkualitas yang dilakukan oleh manajemen. Ketika informasi dalam laporan keuangan tidak sama seperti kenyataan, hal tersebut akan membuat nilai perusahaan turun dan reputasi perusahaan menjadi hancur. Kualitas audit bisa juga didefinisikan sebagai kemungkinan untuk melakukan deteksi dan melakukan pelaporan kesalahan secara material yang terdapat pada laporan keuangan. (DeAngelo, 2014). Maka dari itu diperlukan kualitas audit yang baik agar kesalahan dalam laporan keuangan dapat diminimalisir. Pelaporan keuangan dapat dipertinggi dengan kemampuan dari kualitas audit. Kepercayaan investor dapat meningkat dengan adanya kualitas audit yang tinggi. Kualitas audit tersebut termasuk bagus dan dapat diperoleh dari pengalaman auditor sendiri.

Banyak tujuan dari audit untuk laporan keuangan. Secara umum tujuan audit adalah untuk menyatakan jika pendapat atas adanya kewajaran pada banyak hal mengenai material, arus kas, hasil usaha, dan posisi dari keuangan yang sesuai dengan prinsip dari akuntansi yang berlaku di Indonesia (Kartika, 2011). Asersi yang ada dalam laporan keuangan merupakan hal yang dapat dinilai jika ada pihak yang ingin melihat laporan tersebut wajar atau tidak. Asersi merupakan bentuk pernyataan dari manajemen yang ada dalam laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat eksplisit dan implisit. Audit dapat digolongkan berdasarkan tujuan.

Menurut Halim (2008), audit dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit. Ada tiga jenis audit yang termasuk di kategori ini, yaitu:

1. *Financial Statement Audit* atau audit mengenai laporan keuangan merupakan kategori audit berupa bukti pengevaluasian dan penghimpunan untuk laporan keuangan. Hal tersebut merupakan suatu entitas yang bertujuan banyak hal, seperti laporan keuangan yang dapat diberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan dengan wajar berdasarkan kriteria menurut PABU atau prinsip akuntansi yang diterima umum.
2. *Compliance Audit* atau audit kepatuhan merupakan kategori audit yang memiliki cakupan dalam evaluasi dan himpunan mengenai bukti yang ada dengan melihat tujuan untuk menentukan satu hal, apakah kegiatan operasi atau financial sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perusahaan harus patuh terhadap aturan.
3. *Operational Audit* atau audit operasional merupakan kategori audit yang meliputi meliputi evaluasi dan himpunan mengenai kegiatan seperti efektifitas, efisiensi, dan kehematan atau ekonomis dalam operasional organisasi.

Menurut SPAP atau Standar Profesional Akuntansi Publik ada tiga kelompok dalam standar audit, sebagai berikut:

1. Standar Umum, dibagi menjadi tiga:
 - a. Pelatihan dan keahlian teknis yang cukup diperlukan untuk menjadi seorang audit.

- b. Seorang auditor harus memiliki sikap mental yang berhubungan dengan independensi, dan penugasan yang harus dipertahankan.
 - c. Kemahiran profesional yang cermat dan seksama wajib digunakan oleh auditor dalam menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan, dibagi menjadi tiga:
- a. Jika seorang auditor menggunakan asisten, asistennya harus disupervisi dan direncanakan dengan baik.
 - b. Untuk merencanakan audit harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai struktur pengendalian intern. Hal tersebut juga digunakan untuk menentukan lingkup pengujian, sifat saat dilakukan.
 - c. Inspeksi diperlukan untuk bukti audit yang kompeten. Tidak hanya inspeksi tetapi juga konfirmasi, pengamatan, dan pengajuan sebagai dasar untuk laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan, dibagi menjadi 3, yaitu:
- a. Laporan mengenai audit yang ada diharuskan untuk menyatakan tentang laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan prinsip tentang akuntansi yang berlaku secara umum.
 - b. Laporan mengenai audit diharuskan berisi mengenai keadaan yang ditunjukkan dalam prinsip mengenai akuntansi dengan cara yang konsisten penerapannya untuk menyusun laporan dalam keuangan pada saat periode yang sedang berjalan untuk hubungan yang ada didalam periode yang telah berlangsung sebelumnya.

- c. Informasi diungkapkan dalam laporan keuangan diharuskan untuk dilihat secara memadai, laporan audit dapat memberikan pengecualian dalam hal lain.
- d. Sebuah pernyataan pendapat harus dimuat dalam laporan audit seluruhnya dan ada sebuah asersi jika pernyataan ada yang tidak diberikan.

Lamanya penyelesaian audit merupakan dampak dari pemenuhan standar audit yang dilakukan oleh auditor. Dampak lain juga terjadi pada tingkat kualitas hasil audit yang ada. Jika standar audit banyak yang terpenuhi, maka pelaksanaan audit akan semakin bagus. Tetapi, jika waktu yang diperlukan pendek, maka pekerjaan audit akan semakin tidak sesuai dengan standard. Menurut Subekti dan Widiyanti (2004), akan ada kondisi seperti yang dijelaskan diatas akan membuat timbulnya sebuah dilema untuk auditor. Hal tersebut seringkali membuat auditor sulit untuk menentukan waktu pengerjaan agar hasil menjadi maksimal.

Menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* atau GCG yang menyatakan bahwa pengguna memberikan kepercayaan mengenai kualitas jasa yang tepat dengan cara memilih KAP atau Kantor Akuntan Publik untuk melihat pengawasan kualitas kerja. Memandang Kantor Akuntan Publik yang kompeten dan independen sangatlah penting bagi pengguna laporan keuangan. Kualitas audit akan meningkat ketika jasa yang diberikan berharga dan baik kepada pengguna. Semakin bagus jasa yang diberikan, maka pengguna akan semakin puas. Hal tersebut akan membuat KAP bertindak dengan cara profesionalisme yang semakin tinggi.

Francis dan Wang (2008) meneliti tentang pengaruh audit dari auditor *big 4* dan juga mengenai perlindungan untuk investor yang terdapat di kualitas laba dengan sampel luar negeri. Hasil dari penelitian tersebut adalah kualitas laba yang dijabarkan oleh perusahaan dengan menggunakan auditor *big 4* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan auditor *big 4* pada saat melakukan perlindungan untuk para investor yang lebih kuat di negara tersebut. Keahlian audit memiliki peran dalam melakukan monitoring pada hal yang menghambat adanya manajemen laba (Debosky dan Jiang, 2012). Ada penelitian lain dari Ahmad dan Mansur (2009) di Malaysia, mengenai laba yang diratakan oleh manajemen dari perusahaan dapat dipengaruhi oleh nama auditor independen. Jadi, nama auditor yang semakin bagus pada saat melakukan audit perusahaan akan membuat kemungkinan perataan laba semakin kecil untuk terjadi. Auditor yang memiliki ukuran KAP atau Kantor Akuntan Publik tidak memiliki pengaruh dengan tindakan perataan laba yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pengembangan penelitian ini, diantaranya:

1. Suhartati, Titik (2013) yang berjudul Pengaruh Efektifitas Komisaris dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit dan Manajemen Laba (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI). Dalam penelitian ini ditemukan mengenai manajemen laba atau tindakan *earning management* yang telah diprosikan menggunakan nilai akuntansi yang luwes secara signifikan memiliki pengaruh untuk nilai dalam pasar

kemudian juga arah yang positif. Jadi, nilai manajemen laba yang semakin tinggi akan bisa membuat peningkatan pada nilai pasar. Bagaimana kondisi signifikan dari nilai pasar akan memberikan pengaruh terhadap arah yang positif. Jadi nilai pasar yang meningkat diakibatkan oleh nilai risiko pasar yang juga tinggi. Kepemilikan oleh institusi yang tidak memperhatikan peningkatan atau penurunan mengenai total dari kepemilikan institusi tidak ada pengaruhnya untuk nilai pasar. Nilai pasar yang positif juga bisa dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Jadi, ketika kepemilikan bertambah, nilai pasar juga akan meningkat. *Age* umur perusahaan memiliki proksi dengan variabel kontrol nilai perusahaan, pertumbuhan dari penjualan dan ukuran aset perusahaan memperlihatkan hasil jika ukuran signifikan dari perusahaan memiliki pengaruh terhadap arah positif dan nilai pasar. Penjualan yang tumbuh dengan cara yang signifikan memiliki pengaruh untuk nilai pasar dengan arah yang positif. Jadi, hipotesis H_1 , H_2 dan H_4 terbukti, sedangkan H_3 tidak terbukti.

2. Tri Wicaksono, Agung Pambudi, Desrir Miftah (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, Dan Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Praktik *Real Earning Management*. Penelitian tersebut menghasilkan informasi jika komposisi dari dewan komisaris tidak memiliki pengaruh pada manajemen laba melalui praktik *Real Earning Management*. Tetapi, struktur kepemilikan manajerial dan karakter dari komite audit memiliki pengaruh yang negatif pada manajemen laba dengan tindakan *Real Earning*

Management. Manajemen laba pada tindakan *Real Earning Management* dipengaruhi oleh variabel mekanisme *corporate governance*.

3. Penelitian Zgarni *et al.* (2016) yang berjudul *Effective Audit Committee, Audit Quality, and Earning Management: Evidence From Tunisia*. Menunjukkan hasil jika ada hubungan yang lengkap pada auditor dalam spesialis industri dan efektivitas dari komite audit untuk membatasi *earning management*. Hubungan jangka panjang dimiliki dengan komite audit dengan auditor eksternal. Ketergantungan dan kepercayaan akan bisa dihasilkan dengan perusahaan. *earning management* bisa ditingkatkan dengan masa audit yang panjang.
4. Achmad Junaedi dan Khoirina Farina (2017) yang berjudul *Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Dan Kualitas Audit Terhadap Perataan Laba*. Menurut hasil empiris yang diuji untuk variabel efektivitas komite audit, kualitas audit dan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada tindakan manajemen laba. Tetapi jika keluarga yang mengendalikan perusahaan dan dimiliki oleh asing akan memunculkan praktik dalam manajemen laba. Variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan yang tidak memiliki pengaruh pada kemungkinan adanya praktik manajemen laba.
5. Eka Lestari dan Murtanto (2017) yang berjudul *Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba*. Menurut hasil pembahasan dan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan jika manajemen laba bisa mendapatkan

pengaruh negatif dari dewan komisaris. Ada juga hasil lain yang menunjukkan jika manajemen laba tidak dipengaruhi oleh komite audit. Kemudian, kepemilikan fokus pada pengaruh negatif di manajemen laba, kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, manajemen laba tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Tidak ada pengaruh dari kepemilikan institusional, begitu pula kualitas audit, pengaruh justru didapat dari ukuran perusahaan, kinerja perusahaan memberikan pengaruh yang positif untuk manajemen laba dan manajemen laba mendapat pengaruh dari *leverage*.

6. Aminul Amin, Djuminah, Djoko Suhardjanto, dan Sri Wahyu Agustiningsih (2017) yang berjudul *Board-Auditor Interaction and Earnings Management: The Model of Company with Concentrated Ownership*. Studi ini menemukan empat (4) karakteristik Dewan Komisaris yang mempengaruhi manajemen laba. Tiga dari mereka (independensi, keahlian, dan ukuran) memiliki efek negatif; yang lain (rapat) berpengaruh positif terhadap kualitas laba.
7. Penelitian dari I Made Arya Partayadnya dan I Made Sadha Suardikha (2018) yang berjudul Pengaruh Mekanisme GCG, Kualitas Audit, dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan jika *leverage*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional memberi pengaruh positif untuk manajemen laba. Manajemen laba mendapat pengaruh negatif dari komite

audit. Manajemen laba tidak mendapat pengaruh dari kualitas audit dan kepemilikan manajerial..

8. Fani dan Yie Ke Feliana (2019) yang berjudul Efektivitas Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap *Earnings Management* Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI. Hasil pengujian dari pembahasan dan statistik penelitian tersebut membuktikan jika seluruh peran komite audit belum bisa efektif yang menjadikan peran dari komite audit tidak mampu melakukan monitoring dari kinerja manajemen. Tetapi, pada saat moderinasis komite audit dilakukan dengan reputasi auditor, akan ada peran efektif pada menurunnya *earning management*. Auditor pada spesialisasi industri yang melakukan moderenisasi pada komite audit akan menjadikan peran menjadi tidak efektif yang menjadikan tidak adanya pengaruh dalam menurunnya *earning management*. Termasuk juga masa audit panjang yang memoderenisasi komite audit tidak akan memberi pengaruh pada *earning management*..
9. Rindi Fitria Dewi dan Aria Farah Mita (2019) yang berjudul *The Impact of Audit Committee's Financial Expertise and Status on Accrual Earnings Management*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap akrual manajemen pendapatan. Sedangkan, Status komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap akrual manajemen pendapatan.
10. Tutik Arniati, Dyah Aruning Puspita, Aminul Amin, dan Kashan Pirzada (2019) yang berjudul *The Implementation Of Good Corporate Governance*

Model And Auditor Independence In Earnings' Qaulity Improvement.

Hasil uji menunjukkan bahwa model pemantauan kualitas laba yang dibangun dari interaksi banyak variabel. Mekanisme tata kelola perusahaan terdiri dari variabel-variabel seperti struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), struktur dewan komisaris, struktur komite audit, fungsi audit internal, dan aktivitas pengendalian internal. Nilai Adjusted R-Square mencapai 3,3% dengan nilai signifikansi 0,001. Secara parsial, struktur dewan komisaris, audit internal fungsi, dan aktivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Independensi auditor tidak memoderasi dampak komponen tata kelola perusahaan pada kualitas laba.

11. Cynthia A. Utama dan Sidharta Utama (2019) yang berjudul *Board of Commissioners in Corporate Governance, Firm Performance, and Ownership Structure*. Hasil studi menunjukkan terdapat hubungan timbal-balik antara kinerja perusahaan dan ukuran BOC; ukuran dewan memiliki pengaruh berbentuk U-terbalik terhadap kinerja perusahaan sementara kinerja perusahaan pengaruh negatif pada ukuran dewan. Hasil studi menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris meningkatkan kinerja perusahaan sampai pada tingkatan tertentu, namun ukuran dewan yang terlalu besar menurunkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, struktur kepemilikan memiliki pengaruh tidak langsung namun tidak terlalu kuat terhadap efek kinerja perusahaan pada ukuran dewan. Selain itu, kinerja perusahaan tidak berpengaruh terhadap ukuran dewan seiring peningkatan

struktur kepemilikan. Di sisi lain, jika perbedaan antara kendali dan hak kepemilikan meningkat, efek negatif dari kinerja perusahaan terhadap ukuran dewan menguat secara marginal.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.

Komisaris independen bisa bertindak untuk menjadi penengah pada perselisihan yang sudah terjadi dan dilakukan antara semua manajemen internal dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen untuk memberikan nasihat kepada manajemen (Fama dan Jensen, 1983). Komisaris independen adalah posisi yang paling baik untuk menciptakan perusahaan yang *good corporate governance* dengan melaksanakan fungsi monitoring. Fungsi tersebut dipengaruhi adanya sikap monitoring yang bisa dilakukan oleh dewan komisaris. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris tersebut, dalamnya terdapat komisaris independen dan utama.

Anggota dewan komisaris dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari perusahaan bagian luar atau yang disebut dengan *outside director*, tindakan manajemen laba dipengaruhi oleh hal tersebut (Xie *et al.* ,2003). Jadi yang membuat munculnya manajemen laba juga berasal dari luar perusahaan. Ada penelitian di Taiwan dari Kao dan Chen (2004) adanya bukti jika sikap independen dari komisi eksternal pada manajemen lebih banyak daripada komisi dari internal. Jadi, akan membuat lebih efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan manajemen. Kesimpulan untuk penelitian tersebut adalah seberapa

besar pengaruh dari proporsi komisaris eksternal. Proporsi eksternal yang kondisinya semakin besar, akan membuat manajemen laba bisa berkurang. Menurut penjelasan dari penelitian serta teori yang telah ada, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₁ : Efektivitas dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2.3.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.

Pihak manajemen yang termasuk dalam kepemilikan saham disebut sebagai kepemilikan manajerial. Kepentingan dari manajer dan pemegang saham dapat diisejajarkan oleh kepentingan saham manajerial. Hal tersebut dikarenakan keputusan yang diambil memberi manfaat pada manajer secara langsung. Tetapi mereka juga turut serta menerima resiko pada saat terjadi kerugian yang diakibatkan dari salahnya mengambil keputusan (Jensen, 1976).

Tindakan praktik perataan laba yang berbeda dihasilkan dari motivasi yang berbeda. Pemegang saham yang merupakan seorang manajer dan seorang manajer yang bukan dari pemegang saham memiliki motivasi yang sangat berbeda. Pernyataan tersebut sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan yang terdiri dari dua kriteria, yaitu:

1. Pemilik dan manajer atau *owner-manager* yang memimpin sebuah perusahaan,
2. Manajer dan bukan pemilik atau *non owner manager* yang memimpin sebuah perusahaan.

Praktik perataan laba dapat dipengaruhi oleh dua kriteria diatas karena menurut Boediono (2005), pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dapat ditentukan oleh kepemilikan dari seorang manajer berpengaruh pada metode akuntansi yang dapat diterapkan di suatu perusahaan yang dikelola mereka. Jadi peran seorang manajer juga penting dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan manajerial dalam perusahaan bisa memberi insentif untuk manajemen pada saat dilakukannya perataan laba. Menurut Brochet dan Gildao (2004) saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen akan membuat mereka mendapatkan lebih banyak informasi jika dibandingkan dengan pemegang saham yang bukan dari institusi. Pernyataan tersebut merupakan dasar munculnya kesempatan untuk perataan laba dan mengurangi volatilitas yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja saham dalam perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah :

H₂ : Struktur kepemilikan (manajerial) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2.3.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.

Kepemilikan institusional merupakan hitungan presentase berupa saham perusahaan yang beredar milik institusi. Adanya investor institusi tersebut memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengawasan pada kebijakan dan manajemen perusahaan. Seorang manajer didorong oleh tindakan pengawasan tersebut agar lebih fokus pada kinerja perusahaan yang akan mengurangi perilaku manajemen laba yang telah dilakukan oleh manajer. Menurut Balsam *et al.*,

(2002), praktik manajemen laba dapat dikurangi dengan kepemilikan institusi, tetapi hal tersebut tergantung pada seberapa signifikan kepemilikan yang ada kemudian pihak manajemen dapat dimonitoring untuk kemudian mengurangi motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Jumlah kepemilikan dari institusional yang bagus dapat mengurangi praktik manajemen laba. Investor institusi memiliki kemampuan untuk memonitoring manajer yang akan melakukan manajemen laba.

Saham yang dimiliki oleh pihak institusi dapat menjadi pengawas untuk aktifitas perusahaan. Menurut Madiastuty dan Machfoedz (2003), pemegang saham yang merupakan investor dari institusi bisa melakukan pengurangan dari tindakan manajemen laba dikarenakan mereka dianggap memiliki pengalaman yang lebih. Pengalaman dari investor institusi yang memiliki saham akan mengurangi manajemen laba. Pada saat seorang institusi yang tinggi dimiliki oleh sebuah perusahaan akan membatasi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba (perataan laba) (Juniarti dan Carolina, 2005). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah :

H₃ : Struktur kepemilikan (institusional) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.

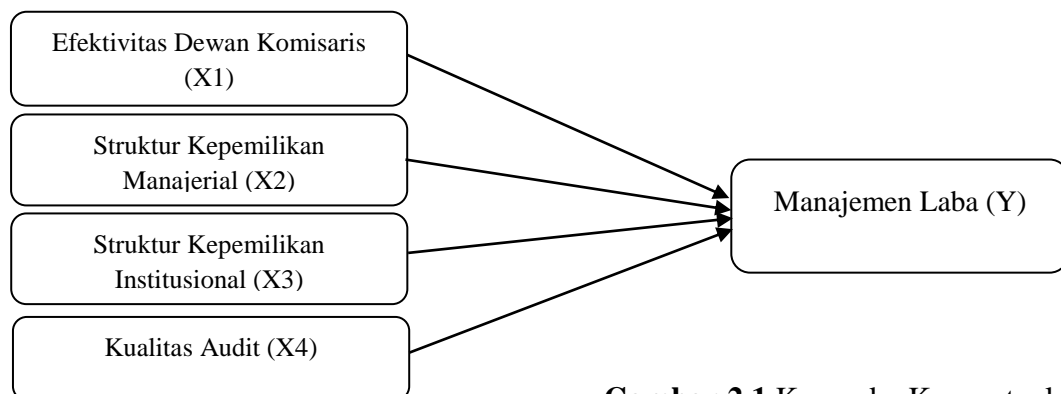
Tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba dapat dicegah oleh audit yang berkualitas. Karena reputasi perusahaan akan hancur saat laporan mengenai keuangan sebuah perusahaan bisa dibuktikan jika terdapat informasi

yang tidak selaras yang akan membuat turunnya nilai perusahaan. De Angelo (1981) menjelaskan bahwa kemungkinan gabungan dalam hal kualitas audit bisa melakukan deteksi atas adanya kesalahan dan melaporkan materi mengenai laporan keuangan. (Khrisnan , 2003; Balsam *et al.*, 2003; Behn *et al.*, 2003; dan Kwon *et al.*, 2007) telah menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi praktik majemen laba adalah melalui auditor eksternal yang berkualitas. Perusahaan tidak perlu khawati mengenai kesalahan dalam laporan keuangan karena akan terdeteksi oleh audit. Audit memiliki kualitas yang dipandang sebagai kemampuan untuk meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan perusahaan. Diharapkan kepercayaan investor akan meningkat bersamaan dengan kualitas audit yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₄ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian teori, pengembangan hipotesis, dan beberapa penelitian terdahulu, selanjutnya disusun kerangka konseptual untuk penelitian ini, yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual